Aspek Hukum Dalam studi kelayakan bisnis

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis

**DAHLIA
90500120006**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSA
2021**

ABSTRAK

Aspek hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu perjanjian, karena dengan memperhatikan aspek hukum, maka para pihak akan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan timbul dalam perjanjian. Hal itu dikarenakan para pihak yang bersangkutan dalam proses terjadinya sebuah buku, terutama pihak penerbit dan pengarang akan mengetahui hak-hak apa saja yang dimilikinya dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dijalankannya. Hal yang lebih penting lagi adalah para pihak dapat mengetahui bagaimana jalan keluar apabila ternyata masih terjadi suatu perselisihan atau persengketaan, sehingga dengan demikian akan diperoleh suatu penyelesaian yang dapat memuaskan kedua pihak dan mengurangi kerugian yang timbul akibat terbuangnya waktu, tenaga dan biaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Analisis Aspek Hukum” ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi kelayakan bisnis. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Perbankan Syariah bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu ST.HAFSAH UMAR ,M.AK. selaku dosen pada mata kuliah Studi kelayakan bisnis yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni.

Kami menyadari, makalah yang tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Makassar, 8 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

Aspek hukum

a. Pengertian Aspek Hukum

b. Tujuan Aspek Hukum

c. Bentuk-Bentuk Badan Hukum

d. Cara Pelaksanaan Bisnis

e. Peraturan dan perundangan

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR REFERENSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

sering kali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis hukum yang dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain.

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum..

Masalah yang timbul kadang kala sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dari semua aspek, ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam penilaian dari segi keabsahan atau kelegalitasan di bidang hukum dan lain sebagainya sebelum usaha tersebut dijalankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, makalah ini dijabarkan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Aspek Hukum?
2. Apa tujuan dan fungsi dari Aspek Hukum?
3. Apa perbedaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ?
4. Bagaimanakah pengoperasionalan akuntansi syariah pada lembaga keuangan bank dan non bank ?

C. Tujuan

Analisis aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan “Apakah bisnis

Yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan Di suatu wilayah?”

Sacara spesifik analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk :

- 1.Menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan
- 2.Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan
- 3.Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan
- 4.Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman

PEMBAHASAN

1..ASPEK HUKUM

A. Pengertian Aspek Hukum

Ketika membangun sebuah usaha bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain.

Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu invndirian

usaha(pendirian badan usaha), ijin produk, ijin lokasi, dan ijin investasi. Manfaat dari ijin yang diajukan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ijin Pendirian Usaha :- Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya- Untuk memperoleh kepastian usahasehingga memudahkan kerjasama dan/atau perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.- Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.- Terlindungi dari praktek usaha yang tidak jujur.

2. Ijin produk :- Membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk. Contohnya: Standar kualitas (SNI), makanan aman konsumsi (BPOM, Halal)

3. Ijin lokasi :- Keamanan dan ketenangan dalam menjalankan suatu usaha di suatu lokasi.- Adanya dukungan dari masyarakat sekitar.

4. Ijin Investasi :- Agar masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Dari penjelasan beberapa manfaat yang didapatkan dengan memenuhi aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, maka dapat disimpulkan bahwa aspek hukum sangat penting dan berperan dalam kelangsungan bisnis suatu perusahaan, di setiap tahap dan proses perusahaan. Aspek hukum dapat mempengaruhi setiap aspek-aspek dalam SKB, sehingga aspek hukum penting untuk diperhatikan sebelum mendirikan suatu usaha.

Setiap pengusaha menghendaki adanya ketenangan dan keberlanjutan usaha. Hal terapan usaha. Hal tersebut dapat dicapai jika lingkungan usaha menerima dan mendukung keberadaan usaha. Keberadaan usaha yang dapat diterima oleh lingkungan biasanya mampu

memberikan kemanfaatan bagi semua komponen masyarakat sekitarnya. Keberlanjutan usaha selain ditentukan oleh factor-faktor fundamental bisnis berupa pasar, produksi, sumber daya manusia dan keuangan juga harus ditunjang adanya legalitas usaha. Sebaik apapun prospek bisnis yang akan dijalankan, seanggih apapun teknologi dan operasi, seprofesional apapun personalia dan se solid dan seluk id apapun sumber keuangannya, namun jika legalitas usaha tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari otoritas pemerintah melalui instansi/departemen terkait, usaha tersebut tidak akan dapat beroperasi dalam waktu yang lama dan berkelanjutan, sehingga

Dengan legalitas usaha (memenuhi syarat aspek hukum). Analisis aspek hukum dimaksudkan untuk meyakini apakah secara hukum (yuridis) rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, bisnis akan mengalami resiko yang besar terutama akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau akan di protes oleh masyarakat. Analisis aspek hukum mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun serta dioperasikan di wilayah tertentu harus memenuhi aturan hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Keterlanjuran investasi di suatu daerah/wilayah yang ternyata melarang usaha yang akan dilakukan akan menimbulkan kerugian besar. Di pandang dari sudut sumbernya, bentuk legalitas dapat dibedakan menjadi 2 sumber, yaitu:

1. Kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah /wilayah tempat proyek/bisnis yang akan didirikan. Masyarakat ini dapat menjadi Bagian dari system dan struktur pemerintahan ataupun kelompok adat/suku. Misalnya, dalam struktur pemerintahan terdapat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Selain itu terdapat kelompok adat/suku, misalnya suku/adat Minang, Dayak, Bugis, dan sebagainya yang menguasai tanah ulayat.

2. Pemerintah, yang merupakan bagian dari struktur dan system pemerintah Indonesia termasuk lembaga pemerintah dari desa sampai Negara serta instansi/lembaga/departemen yang membidangi sector-sektor tertentu. Untuk mendapatkan legalitas usaha, kedua sumber tersebut di atas harus diperhatikan. Untuk mendapatkan perizinan/legalitas pemerintah, perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kelompok masyarakat. Misalnya, perusahaan yang ingin mendapatkan izin mendirikan usaha perdagangan (SIUP) dari pemda setempat. Terlebih dahulu harus meminta surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan sepengetahuan RT/RW setempat dimana lokasi usaha tersebut akan didirikan. Usaha dapat dikatakan legal jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat melalui instansi/lembaga/departemen/dinas terkait. Namun, analis dan investor perlu memperhatikan sumber legal dari kelompok masyarakat. Sering terjadi ketika pemerintah telah mengizinkan suatu usaha, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha menolak, sehingga usaha tidak dapat berjalan secara wajar. Hal ini akan sangat merugikan bagi perjalanan bisnis selanjutnya, bahkan perusahaan dapat bangkrut dan ditutup. Untuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis diyakini layak dari segi hukum dapat dipelajari dari berbagai sisi, diantaranya adalah bentuk jenis usaha, identitas pelaksana bisnis,

Bisnis apa yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan dan tempat dimana rencana bisnis tersebut akan dilaksanakan. Kajian hukum terhadap rencana bisnis tersebut hendaknya menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga setelah dikaji secara seksama, akan tampak jelas layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut dilihat dari aspek

hukum. Dalam aspek hukum dan legalitas ini, ada beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan

b. Komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan (komoditas) yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang.

B. Tujuan Aspek Hukum

Aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan “Apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah? Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk:

Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman

C. Bentuk-Bentuk Badan Hukum

Beberapa bentuk perusahaan dari sisi aspek hukum adalah:

Agar rencana bisnis dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku, maka diperlukan data tentang siapa pelaksana bisnis tersebut. Untuk menganalisis siapa pelaksana bisnis tersebut, maka yang pertama harus diketahui adalah badan usahanya dan yang kedua adalah orang-orang atau individu-individu yang terlibat sebagai pengambilan keputusan

1. Badan Usaha Perseorangan / Individu

Perusahaan jenis ini biasanya diawasi dan dikelola seseorang. Di satu pihak ia memperoleh semua keuntungan perusahaan, selain menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan. Biasanya, bentuk izin usahanya adalah usaha dagang (UD) dan perusahaan dagang (PD) dengan izin operasional berupa SIUP kecil yang dapat diperoleh di Dinas perdagangan atau Disperindag (Dinas perindustrian dan perdagangan). Perusahaan perseorangan ini belum membutuhkan akta pendirian walaupun. Untuk mendapat perlindungan hukum perusahaan ini harus didaftarkan pada instansi terkait sehingga memperoleh status terdaftar. Status ini penting karena akan mendapat fasilitas bantuan dari pemerintah, dapat fasilitas kredit dari bank, dilindungi pemerintahan dan berpeluang mengembangkan usaha, sehingga diperlukan surat izin.

2. Firma (fa)

Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada

pihak lain. Bila terjadi kerugian maka kerugian ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar. Badan usaha ini dimiliki oleh lebih dari satu orang dengan perjanjian tertentu. Biasanya pemilik firma adalah orang yang sangat dekat misalnya keluarga atau famili. Oleh karena pemilik perusahaan lebih dari satu orang maka harus didaftarkan pada akta notaris kemudian didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita negara. Secara hukum perjanjian antar pemilik akan lebih kuat. Kepemimpinan perusahaan biasanya ditentukan dengan cara kesepakatan bersama, karena mereka bertanggung jawab penuh terhadap badan usaha ini. Firma adalah rupa orang sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian, kerugian itu akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar. Bentuk firma ini sudah jarang dijumpai di Indonesia, mungkin kurang diminati, karena pertimbangan faktor risiko yang dianggap terlalu besar bagi sebagian investor

1. Perseroan Komanditer (CV).

CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam Perseroan Komanditer ini ada dua macam, ada yang disebut sekutu komplementer yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Perseroan komanditer (CV) merupakan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan masing-masing menyerahkan sejumlah uang yang tidak perlu sama. Sekutu dalam perseroan komanditer ini ada 2 macam, yaitu:

Sekutu aktif (komplementer/persero), yaitu orang-orang yang bersedia mengatur perusahaan. Tanggung jawab sekutu ini tidak hanya terbatas pada modal yang ditanamkan tetapi juga atas harta kekayaan pribadi. Sekutu pasif komanditer, yaitu orang-orang yang mempercayakan modal usahanya dan bertanggung jawab sebatas modal yang diikuti sertakan dalam perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

2. Perseroan Terbatas (PT).

Badan jenis ini adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang dimiliki. Tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan, makin banyak saham yang dimiliki makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan modal yang diperoleh dengan penjualan atas saham-saham. Semua pemilik perusahaan adalah pemilik perusahaan. Tanggung jawab persero (pemegang saham) hanya sebatas pada modal yang disertakan besarnya modal persero. Ditentukan dengan anggaran dasar. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan perusahaan sendiri, sehingga tagihan hutang-hutang perusahaan ditanggung oleh harta persero. Badan usaha jenis ini adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak milik, dan tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan melalui saham perusahaan. Makin banyak saham yang dimiliki, makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Untuk mendirikan perseroan terbatas ini harus dengan akta pendirian yang

disahkan olehakta notaris yang disetujui oleh menterikehakiman. Keuntungan-keuntungan dibagikandalam bentuk deviden yang dibagikanberdasarkan besarnya saham

3. Perusahaan Negara (PN).

Perusahaan negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali ada hal-hal yang khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan Negara atau sering disebutBUMN (badan usaha milik Negara) adalahperusahaan yang bergerak dalam bidang usahayang modalnya secara keseluruhan dimilikiNegara, kecuali jika ada hal-hal khususberdasarkan undang-undang. Tujuan pendirianperusahaan ini adalah membangun ekonominasional menuju masyarakat adil makmur.

4. Koperasi.

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jadi ia merupakan suatu wadah yang penting untuk kesejahteraan anggota berdasarkan persamaan. Koperasi merupakan bentuk badan usahayang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuanmeningkatkan kesejahteraan anggotanya; sifatnyamurni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jadi,badan usaha ini merupakan wadah penting untukkesejahteraan anggota berdasarkan persamaan.Menurut bidang usaha , koperasi dikelompokkanmenjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi,koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbausaha.Menurut luas usahanya, koperasi terdiriatas primer koperasi (Primkop), pusat koperasi(Puskop), gabungan koperasi (Gakop), dan indukkoperasi (Inkop) sebagai satuan terkecil yangmelibatkan secara langsung anggotanya. Pusatkoperasi merupakan gabungan paling sedikit 5primer koperasi.

Gabungan koperasi merupakan gabungan paling sedikit tiga puskop. Dan, induk koperasi merupakan

D. Cara Pelaksanaan Bisnis

Ketika misalnya perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek, meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan adalah beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan itu. Lembaga keuangan sebagai peminjam telah menentukan syarat-syarat dalam rangka pengamanan secara hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu :

a. Pencegahan

Contoh pencegahan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan terhadap calon debitur misalnya, setiap penggantian persero pada Perseroan Komanditer atau pemegang saham pada Perseroan Terbatas, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari lembaga keuangan yang akan menjadi kreditur.

b. Penanggulangan

Terdapat dua cara penanggulangan, yaitu sebagai berikut:

- 1).jaminan

Jaminan memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai stimulan kesungguhan sponsor proyek dan dapat mengatasi kesulitan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Jenis jaminan bisa dibagi menjadi dua, yaitu jaminan atas benda dan janji tidak bersyarat atau jaminan perorangan. Jaminan atas benda bisa berupa proyek itu sendiri dan jaminan tambahan. Sedangkan janji tidak bersyarat diberikan oleh sponsor proyek atau bisa pula dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya bisnis induk dari calon debitur. Jaminan atas benda, baik berupa proyek maupun jaminan tambahan biasanya berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan, serta piutang.

2).klausula

Dalam hal kreditur menerima barang-barang jaminan kredit dan diasuransikan maka kreditur harus mensyaratkan dalam pengansurasiannya dengan pencantuman klausula bank. Artinya, setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus diterima kreditur.

E. Peraturan dan perundangan

Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek yuridis yang harus dipatuhi dalam pendirian suatu usaha,antara lain:

- 1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan
- 3) UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi

- 4) UU No.13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung
- 6) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 7) UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- 8) PP No. 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Perseroan dibidang Pengelolaan Aset.

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Untuk memulai suatu usaha pada umumnya dimulai dari Aspek Hukum, walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lain. Di dalam melakukan suatu usaha maka perlu diperhatikan berbagai dokumen yang bisa sesuai dengan badan Hukum yang berlaku, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badanhukum, izin-izin

yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian, dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Tujuan dari aspek hukum ini adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diteliti. Penelitian keabsahan dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan, penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu

DAFTAR REFERENSI

Husain, Umar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis (Edisi 2), Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama)

Kasmir, Jakfar. 2006. Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana)

Jumingan. 2009. Studi Kelayakan Bisnis : Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan, (Jakarta: PT Bumi Angkasa)

Husein Umar :Studi kelayakan Bisnis. Edisi-1, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000
Husein Umar : Manajemen Risiko Bisnis. Jakarta: PT.

Rahmawati, indah. 2011. Pentingnya Wajib Daftar Perusahaan dan Peranan Wajib daftar Perusahaan Bagi Perkembangan Perekonomian Bangsa
(online) .<http://Windahrahmawati.wordpress.com/pentingnya-wajib-daftar-perusahaan-dan-peranan-wajib-daftar-perusahaan-bagiperkembangan-perekonomian-bangsa/>. Diakses Pada 6 Desember 2014